



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
Jalan Wijaya II / 42 Kebayoran Baru Jakarta 12160

Jakarta, ~~30~~ September 2026

Nomor : B/~~19900~~/IX/RES.1.24./2026/Reskrim Jaksel
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada

Yth. RAHMAT WIBOWO

di

Jawa Barat

1. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pasal 3 dan pasal 618 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - Pasal 1 angka 47, angka 48 dan angka 52, Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf j dan Pasal 29 ayat (2), Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
 - Laporan Polisi Nomor: LP/B/3472/IX/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 01 September 2026, atas nama pelapor RAHMAT WIBOWO;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/ ~~6029~~ /IX/RES.1.24./2026/Reskrim Jaksel, tanggal ~~30~~ September 2026.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara, bahwa Penyelidik Unit IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sedang melakukan Penyelidikan terhadap peristiwa dugaan Tindak Pidana Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 UU 1/2023 dan atau 441 UU 1/2023, yang terjadi pada tanggal 01 September 2026 di Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Rt/Rw: 04/04, Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama pelapor RAHMAT WIBOWO.

Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari Saudara selaku Saksi Terlapor, diminta kepada Saudara untuk hadir menemui Penyelidik Unit IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, pada:

Hari : Rabu; ↑
Tanggal : ~~14~~ Oktober 2026;
Pukul : ~~13.30~~ WIB;
Tempat : Unit IV (KRIMSUS) Sat Reskrim, Lt. III Mapolres Metro Jakarta Selatan.

Dengan membawa dokumen berupa dokumen terkait adanya peristiwa tindak pidana tersebut serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

